



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201946257, 16 Juli 2019

Pencipta

Nama : **Ria Wierma Putri S.H.,M.hum**

Alamat : **Perum Korpri Blok D6 No.5 Rt.14 Rw Harapan Jaya Sukarame, Bandar Lampung , Lampung, 35131**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung**

Alamat : **Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedongmeneng, Bandar Lampung, Lampung, 35145**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **HUKUM DIPLOMATIK**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **1 Agustus 2018, di Bandar Lampung**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.**

Nomor pencatatan : **000146353**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



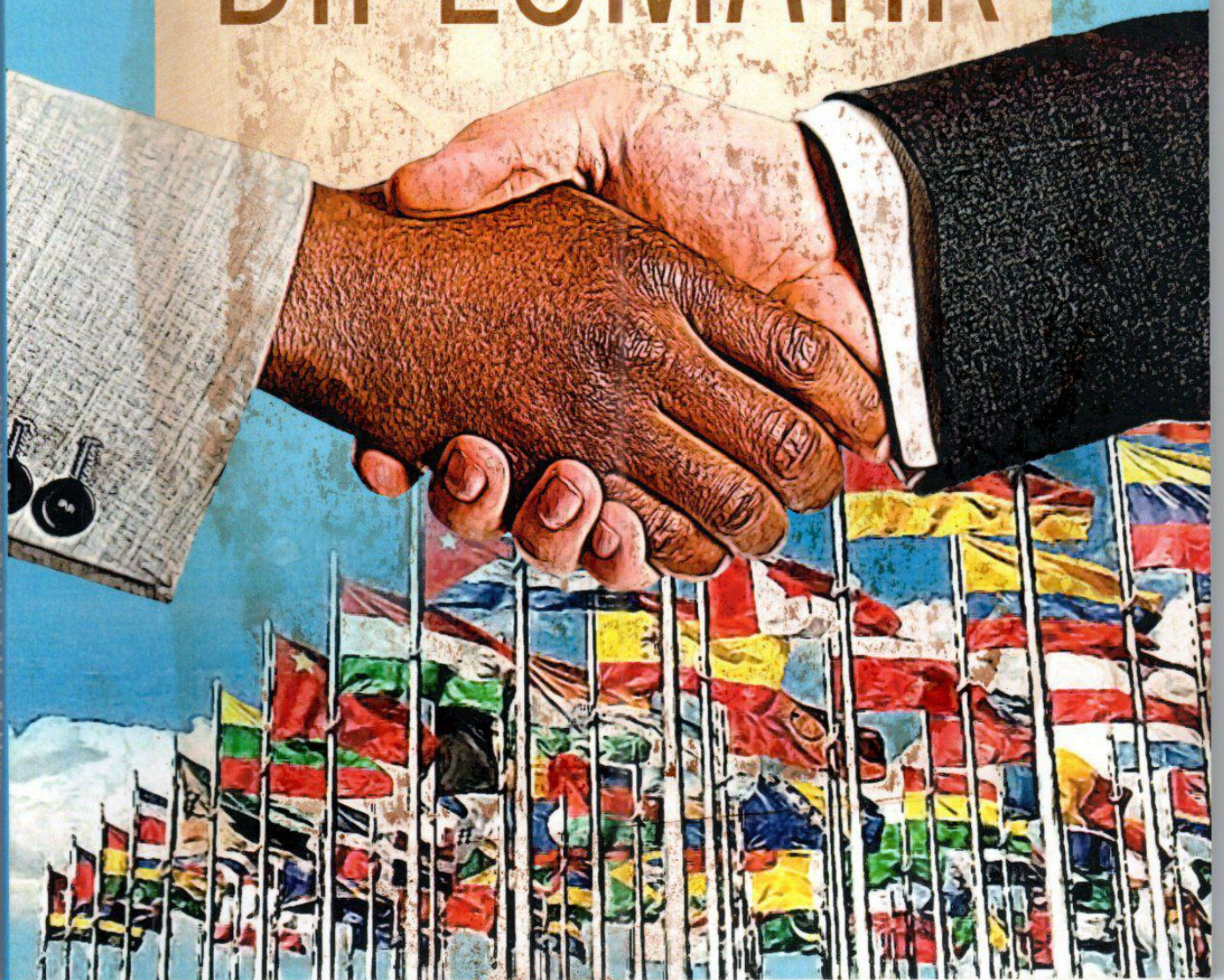
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum.

• BUKU AJAR •

HUKUM DIPLOMATIK



HALAMAN PENGESAHAN

Judul Diktat : Hukum Diplomatik
Mata Kuliah : Hukum Diplomatik
Kode Mata Kuliah : HKI612504
Nama Penulis : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum.
Nomor Induk Pegawai : 19800929200802023
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 29 September 1980
Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum Internasional
Karya Ilmiah Disajikan : Buku Ajar
Semester : Ganjil 2018/2019

Bandar Lampung, 1 November 2018

Mengetahui,
Pht. Dekan Fakultas Hukum

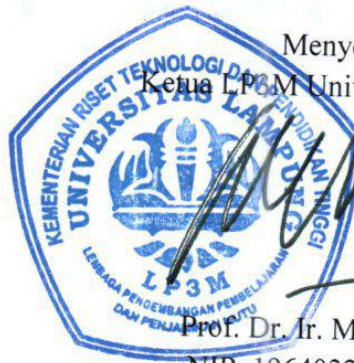


Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
NIP. 196211091988111001

Penulis,

Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum.
NIP. 1980092920080202

Menyetujui,
Ketua LPM Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326198902100

DOKUMEN LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMIN MUTU UNILA	
TANGGAL	14 Nopember 2018
No. TERDAFTAR	900/BA/LP3M/2018
PARAF	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENGERTIAN HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER.....	1
I.1. Pendahuluan.....	1
I.2. Pengertian Hukum Diplomatik dan Konsuler.....	7
I.3. Istilah Istilah Hukum Diplomatik dan Konsuler.	12
I.4. Tempat Kedudukan.....	10
I.5. Latihan	10
I.6. Ringkasan	10
I.7. Bacaan yang Dianjurkan.....	11
BAB II HUBUNGAN DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961.....	12
II.1. Pendahuluan.....	12
II.2. Hubungan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961.	12
II.3. Anggota Perwakilan Diplomatik	13
II.4. Fungsi Perwakilan Diplomatik	18
II.5. Penunjukan, Jumlah, dan Kewarganegaraan Anggota Perwakilan.....	21
II.6. Cara Membuka Hubungan Diplomatik.....	22
II.7. Mulai Berlakunya Fungsi Diplomatik.....	25
II.8. Cara Mengirim Perwakilan	27
II.9. Prinsip tidak diganggu gugatnya Perwakilan Diplomatik (Inviolability of the Diplomatic Mission)	30

II.10.

II.11.

II.12.

II.13.

II.14.

II.15.

II.17.

II.18.

II.19.

II.20.

II.21.

II.22.

BAB III HUBUNGAN

III.1.

III.2.

III.3.

III.4.

III.5.

III.6.

III.7.

III.8.

III.9.

III.10.

..... v
 vi
TIK DAN
 1
 1
 onsuler..... 7
 Konsuler..... 12
 10
 10
 10
 11

KONVENSI
 12
 12
 si Wina 1961. 12
 13
 18
 ganegaraan
 21
 22
 25
 27
 Perwakilan
 tic Mission) 30

II.10. Hak Kekebalan..... 31
 II.11. Hak-hak Istimewa Agen Diplomatik/Perwakilan . 34
 II.12. Hak-hak istimewa dan kekebalan hukum orang-orang lainnya selain agen diplomatik (pasal. 37 dan Pasal 38). 38
 II.13. Hak-hak istimewa dan kekebalan hukum: mulainya, kalau fungsi berakhir dan bila terjadi kematian (Pasal 39)..... 39
 II.14. Hak-hak istimewa dan kekebalan hukum missi saat melewati Negara ketiga (Pasal 40)..... 41
 II.15. Berakhirnya fungsi seorang agen diplomatic (Pasal 43)..... 41
 II.17. Larangan-larangan bagi agen diplomatik..... 42
 II.18. Kewajiban Perwakilan Diplomatik dan Diplomatnya . 44
 II.19. Persona non grata (ex eu ob quod inittitur) 45
 II.20. Latihan 46
 II.21. Ringkasan 46
 II.22. Bacaan yang Dianjurkan..... 46

BAB III HUBUNGAN KONSULER (VIENA CONVENTION 1963) .. 48
 III.1. Pendahuluan 48
 III.2. Istilah-Istilah..... 48
 III.3. Cara Membuka Perwakilan Konsuler 49
 III.4. Anggota Perwakilan Konsuler 53
 III.5. Fungsi-Fungsi/Tugas Konsuler..... 54
 III.6. Ruang Lingkup Tugas Konsuler 55
 III.7. Pejabat Konsuler 56
 III.8. Kewajiban Negara Pengirim 59
 III.9. Berakhirnya Fungsi Seorang Anggota Perwakilan Konsuler (Pasal 25) 59
 III.10. Kewajiban Negara Penerima Terhadap Perwakilan Konsuler 61

III.11. Putusnya Hubungan Diplomatik dan Dampaknya terhadap Perwakilan Konsuler.....	62
III.12. Hubungan Antara Perwakilan Konsuler dengan Perwakilan Diplomatik.....	63
III.13. Hak Perwakilan Konsuler dan Staf.....	64
III.14. Perbedaan Omisi (Consul karier) dan Electi (Konsul kehormatan).....	66
III.15. Konsuler Kehormatan.....	66
III.16. Latihan	67
III.17. Ringkasan	68
III.18. Bacaan yang dianjurkan.....	68
BAB IV HUBUNGAN NEGARA.....	69
IV.1. Pendahuluan	69
IV.2. Dengan adanya hubungan negara akan terbentuk adanya keterwakilan negara di negara lain.....	69
IV.3. Bersifat permanen	69
IV.4. Bersifat sementara	71
IV.5. Latihan	72
IV.6. Ringkasan	72
IV.7. Bacaan yang dianjurkan	72
BAB V PENGIRIMAN MISI KHUSUS (NEW YORK CONVENTION 1969).....	73
V.1. Pendahuluan	73
V.2. Pengertian.....	73
V.3. Pengiriman.....	75
V.4. Anggota Misi Khusus.....	77
V.5. Kewajiban Negara Pengirim dan Anggota Misi Khusus	78
V.6. Latihan	78
V.7. Ringkasan	78
V.8. Bacaan yang dianjurkan	79

ampaknya 62
 62
 r dengan 63
 63
 64
 an Electi 66
 66
 66
 67
 68
 68
 68
 69
 69
 erbentuk 69
 in 69
 69
 71
 72
 72
 72
 72
 YORK 73
 73
 73
 75
 77
 si Khusus 78
 78
 78
 79

BAB IV KETERWAKILAN NEGARA DI ORGANISASI INTERNASIONAL (VIENA CONVENTION 1975) 80

VI.1. Pendahuluan 80
 VI.2. Pengertian 80
 VI.3. Regim yang digunakan 81
 VI.4. Hal-Hal yang Diatur dalam Ketentuan Keterwakilan Negara Di O.I. 81
 VI.5. Contoh Perwakilan Tetap di PBB 82
 VI.6. Subyek Hukum Internasional yang dapat mengrimkan perwakilannya di Organisasi Internasional 83
 VI.7. Negara Anggota 84
 VI.8. Subyek Hukum Internasional Lainnya 84
 VI.9. Pengiriman Delegasi 85
 VI.10. Berdasar Pasal 82 86
 VI.11. Pengakuan O.I. terhadap suatu negara tidak berpengaruh bagi antar negara anggota. 86
 VI.12. Jika anggota delegasi melakukan kejahatan berat. 87
 VI.13. Berdasar Pasal 16 88
 VI.14. Latihan 88
 VI.15. Ringkasan 88
 VI.16. Bacaan yang dianjurkan 89

BAB VII ISTILAH-ISTILAH DIPLOMATIK 90

DAFTAR PUSTAKA 100